



LURAH NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/ Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO

dan

LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa/kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMDesa/Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Ngoro-oro dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Ngoro-oro.
5. Lurah adalah Lurah Ngooro-oro Kapanewon Patuk.

Pasal 2

- (1) RKPKalurahan Tahun 2024 disusun berdasarkan RPJMDesa/Kalurahan Tahun 2018 -2024.
- (2) RKPKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

BAB II

SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

- (1) RKPKalurahan Tahun 2024 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2024
 - Bab V Penutup
- (2) RKPKalurahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) RKPKalurahan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 25 Oktober 2023
LURAH,

ttd
SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 25 Oktober 2023
CARIK,

ttd
DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2023 NOMOR ...4...

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran singkat RPJMDesa/Kalurahan mengenai potensi Kalurahan

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Perencanaan pembangunan kalurahan yang disusun merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga semua dokumen perencanaan kalurahan harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJMDesa/Kalurahan) dan perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan (RKPDesa/Kalurahan) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan.

2. Potensi Sumberdaya kalurahan

Potensi Kalurahan Ngoro-oro yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendorong dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- a. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan.
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Susunan Organisasi.
- c. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
- d. Kesadaran Masyarakat untuk membangun yang cukup tinggi.
- e. Jiwa kegotongroyongan yang masih ada.
- f. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat.
- g. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Potensial untuk usaha ekonomi Produktif.
- h. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan.
- i. Banyaknya masyarakat usia produktif.

Disisi lain permasalahan yang dihadapi Kalurahan Ngoro-oro dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :

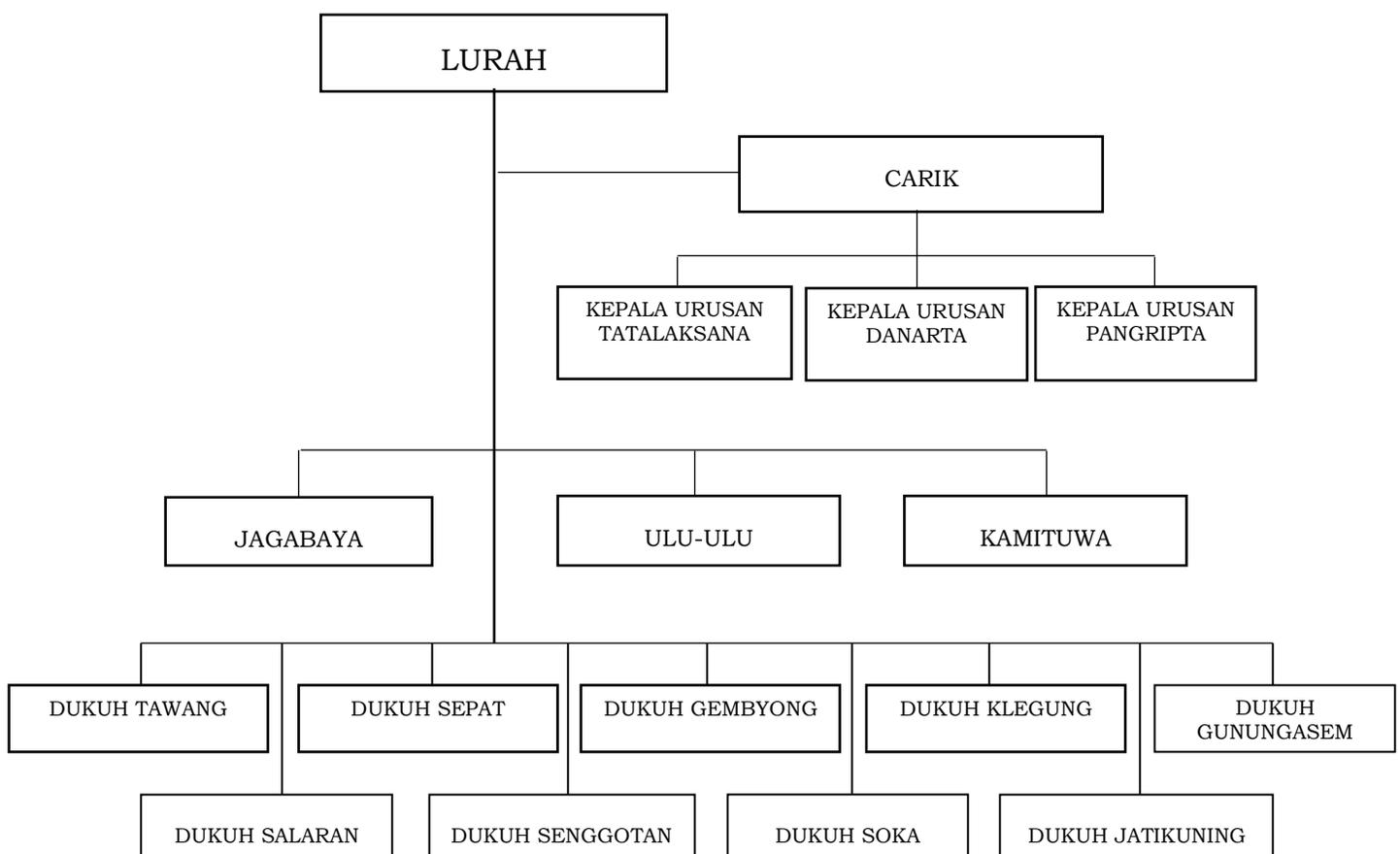
- a. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas.
- b. Belum 100 % masyarakat dapat menikmati listrik.
- c. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih.
- d. Banyak akses jalan yang belum memadai.

- e. Pungutan Asli Kalurahan rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.
 - f. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur).
 - g. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
 - h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
 - i. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai.
 - j. Masyarakat masih enggan meninggalkan sektor pertanian dengan pola tanam tradisional.
 - k. Kondisi geografis yang berpegunungan berupa batu bertanah.
 - l. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga kalurahan dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada terdiri dari :

- Lurah : 1 orang;
- Carik : 1 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Jagabaya : 1 orang;
- Ulu-Ulu : 1 orang;
- Kamituwa : 1 orang;
- Dukuh : 9 orang;
- Staf Pamong Kalurahan : 4 orang.

Bagan Struktur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2019 jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 20 Tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :



4. Pengertian RKP Kalurahan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJM Desa/Kalurahan.

5. Fungsi RKP Kalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan

Tersedianya dokumen RKP Kalurahan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan (APB Desa/Kalurahan) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi kalurahan.

6. Proses penyusunan RKP Kalurahan

Penyusunan Perencanaan kalurahan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan kalurahan yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat kalurahan yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun kalurahan. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

7. Keterkaitan RKP Kalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya :

a. RKP Kalurahan dengan RPJM Kalurahan

RKP Kalurahan dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJM Desa/Kalurahan.

b. RKP Kalurahan dengan RAPB Kalurahan

RKP Kalurahan sebagai pedoman penyusunan APB Kalurahan

c. RKP Kalurahan dengan DURKP Kalurahan

RKP Kalurahan memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DURKP Kalurahan) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon (musrenbang) kapanewon.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
16. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro.

C. Tujuan

1. Tujuan

RKPKalurahan disusun dengan tujuan :

- a. Menyiapkan daftar program kegiatan tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pemerintah kalurahan yang disepakati untuk dilaksanakan dalam RKP-Kalurahan Tahun 2024 sumber pendanaannya dari APBKalurahan.
- b. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2025 untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui panewu sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2026 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).

2. Manfaat

Manfaat disusunnya RKPKalurahan meliputi :

- a. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kalurahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

D. Visi dan Misi Kalurahan.

1. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024, yaitu : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi kalurahan tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kalurahan 2018 – 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa/kalurahan secara terbuka dan menyeluruh.
- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan pamong kalurahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi SDM Pamong Kalurahan dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan kalurahan supaya tercipta sinergi antara pemerintah kalurahan dengan kelembagaan kalurahan yang ada.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umum dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksplorasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Kalurahan Ngoro-oro sebagai berikut:

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kinerja pamong sesuai Standar Operasional dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pamong Kalurahan yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi 3. Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasarakatan yang ada di kalurahan Ngoro-oro
2	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kalurahan secara terbuka dan menyeluruh	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan dengan lembaga-lembaga yang ada di kalurahan
3	Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
4	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat
5	Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masarakat
6	Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya 2. Mewujudkan masyarakat agamis
7	Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Ngoro-oro berada di wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kapanewon ± 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi ± 37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat ± 780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Gayamharjo/ Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
- Sebelah Selatan : Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk
- Sebelah Barat : Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk

Ketinggian tanah di Kalurahan Ngoro-oro rata-rata 355 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 24°C sampai dengan 34°C.

Dengan demikian Kalurahan Ngoro-oro disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Memuat arah kebijakan kalurahan Tahun perencanaan diproyeksikan dari mana saja dan target pendapatan berapa, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN NGORO-ORO
TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2023)	Proyeksi (n-1/2024)	
4	PENDAPATAN			
4 1	Pendapatan Asli Desa	6,600,000	6,600,000	
4 1 1	Hasil Usaha	4,500,000	4,500,000	
4 1 1 1	Bagi Hasil BUMDes	4,500,000	4,500,000	
4 1 2	Hasil Aset	1,350,000	1,350,000	
4 1 2 1	Pengelolaan tanah milik Desa			
4 1 2 3	Pasar Desa			
4 1 2 7	Kios Milik Desa			
4 1 2 8	Pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa			
4 1 2 90	Obyek rekreasi yang dikelola desa;			
4 1 2 91	Balai desa	1,350,000	1,350,000	
4 1 2 92	Kantor desa;			
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	

4 1 3 1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong			
4 1 4	Pendapatan Asli Desa Lain	750,000	750,000	
4 1 4 1	Hasil Pungutan Desa			
4 1 4 90	Penjualan hasil hutan milik desa;			
4 1 4 91	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa			
4 1 4 93	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa			
4 1 4 94	Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa			
4 1 4 96	Hasil pengelolaan tanah kas desa	750,000	750,000	
4 1 4 97	Hasil pelepasan tanah desa			
4 2	Transfer	2,066,413,800	1,894,220,100	
4 2 1	Dana Desa	901,674,000	901,674,000	
4 2 1 1	Dana Desa	901,674,000	901,674,000	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	75,670,100	69,326,700	
4 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	69,326,700	69,326,700	
4 2 2 90	Kekurangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6,343,400		
4 2 3	Alokasi Dana Desa	753,219,400	753,219,400	
4 2 3 1	Alokasi Dana Desa	753,219,400	753,219,400	
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	25,000,000	25,000,000	
4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	25,000,000	25,000,000	
4 2 4 90	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa			
4 2 4 91	Bantuan sarana prasarana kantor desa			
4 2 4 92	Bantuan pengembangan pariwisata/budaya			
4 2 4 93	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	310,850,300	145,000,000	
4 2 5 1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	310,850,300	145,000,000	
4 2 5 90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			
4 2 5 91	Bantuan pelaksanaan Pilkades			
4 2 5 97	Bantuan pembangunan pasar desa			

4 2 5 99	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 3	Pendapatan Lain	32,200,000	18,400,000	
4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4 3 1 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4 3 2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4 3 2 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4 3 3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	28,200,000	18,400,000	
4 3 3 1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	28,200,000	18,400,000	
4 3 4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4 3 4 1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4 3 5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4 3 5 1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-		
4 3 6	Bunga Bank	4,000,000	4,000,000	
4 3 6 1	Bunga Bank	4,000,000	4,000,000	
4 3 9	Pendapatan Lain Desa yang sah	-	-	
4 3 9 90	Insentif/hadiah desa lunas PBB			
4 3 9 91	Hadiah perlombaan			
	JUMLAH PENDAPATAN	2,105,213,800	1,919,220,100	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Memuat arah kebijakan prioritas belanja kalurahan tahun rencana diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2024

5	BELANJA			
5 1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	948,028,134	963,735,404	
5 1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	850,440,335	833,640,335	
5 1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,460,000	44,460,000	ADD, DLL, PBH
5 1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	600,690,000	600,690,000	ADD, DLL, PBH
5 1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41,354,400	41,354,400	ADD
5 1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	56,125,435	40,325,435	ADD
5 1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	53,950,000	53,950,000	ADD
5 1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,050,000	6,050,000	ADD
5 1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,560,500	21,560,500	PBH
5 1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25,250,000	25,250,000	DDS
5 1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14,330,000	22,800,000	
5 1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1,600,000	1,100,000	ADD
5 1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5,000,000	5,000,000	PBH
5 1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		3,000,000	DLL
5 1.2.90	Pengadaan peralatan kerja		7,000,000	PBH
5 1.2.91	Pengadaan mebeleur	1,530,000		PAD
5 1.2.92	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur		1,500,000	PAD
5 1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2,600,000	2,100,000	ADD

5	1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3,600,000	3,100,000	ADD
5	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22,745,000	15,245,000	
5	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10,440,000	4,440,000	PBH
5	1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3,500,000	2,000,000	PAD
5	1.3.90	Penyusunan monografi desa	475,000	475,000	PBH
5	1.3.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	8,330,000	8,330,000	DDS
5	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55,992,770	87,530,040	
5	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	0		PBH
5	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2,975,000	2,975,000	ADD
5	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8,100,000	4,650,000	PBH
5	1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3,600,000	4,190,000	PBH
5	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3,885,000	3,885,000	PAD
5	1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,275,000	1,275,000	ADD
5	1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20,394,000	24,925,000	DDS
5	1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)		2,000,000	PBH
5	1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	6,358,770	6,358,770	PAD, PBK
5	1.4.91	Pengisian perangkat desa/Staf Perangkat Desa		15,700,000	ADD
5	1.4.92	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa		20,500,000	PBH
5	1.4.95	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7,455,000		PBH
5	1.4.96	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1,950,000	1,071,270	PBH
5	1.5.	Sub Bidang Pertanahan	4,520,029	4,520,029	

5	1.5.90	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	4,520,029	4,520,029	DLL
5	2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	868,906,260	709,713,960	
5	2.1.	Sub Bidang Pendidikan	33,325,000	33,325,000	
5	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24,200,000	24,200,000	DDS
5	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5,385,000	5,385,000	DDS
5	2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3,740,000	3,740,000	DDS
5	2.2.	Sub Bidang Kesehatan	166,815,000	170,815,000	
5	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88,460,000	88,460,000	DDS
5	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3,750,000	3,750,000	DDS
5	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11,380,000	11,380,000	DDS
5	2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7,640,000	7,640,000	DDS
5	2.2.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	28,290,000	28,290,000	DDS
5	2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5,015,000	6,515,000	DDS
5	2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	4,705,000	4,705,000	DDS
5	2.2.96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB		2,500,000	DDS
5	2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	17,575,000	17,575,000	DDS
5	2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	535,372,300	292,426,000	
5	2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1,576,000	1,576,000	DDS
5	2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	95,691,000	70,000,000	DDS
5	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	185,850,000	145,850,000	PBK
5	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	80,000,000		PBK

5 2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	132,255,300	50,000,000	DDS, PBK
5 2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	40,000,000	25,000,000	PBP
5 2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	94,022,000	181,607,000	
5 2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	14,473,000		DDS
5 2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)		16,680,000	DDS
5 2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)		17,500,000	DDS
5 2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		65,185,000	DDS
5 2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	18,830,000	37,660,000	DDS
5 2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	60,719,000	44,582,000	DDS
5 2.4.92	Pengelolaan sampah desa/permukiman			DDS
5 2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23,071,960	14,540,960	
5 2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9,400,000	9,400,000	DDS
5 2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	13,671,960	5,140,960	DDS
5 2.8.	Sub Bidang Pariwisata	16,300,000	17,000,000	
5 2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	9,450,000	12,000,000	DDS
5 2.8.90	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6,850,000	5,000,000	DDS
5 3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	65,088,197	40,009,797	
5 3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18,063,400	8,515,000	
5 3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	10,088,400	4,195,000	PBH
5 3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4,320,000	4,320,000	DLL, PBH

5	3.1.91	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat			PBH
5	3.1.92	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung kesiapsiagaan bencana	3,655,000		PBH
5	3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17,755,000	4,975,000	
5	3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,975,000	4,975,000	PAD
5	3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	3,350,000		DLL, PBH
5	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9,430,000		DLL, PBH
5	3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13,839,000	8,089,000	
5	3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	4,050,000	4,050,000	PBH
5	3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5,750,000		PBH
5	3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2,339,000	2,339,000	PBH
5	3.3.93	Operasional Karang Taruna	1,700,000	1,700,000	ADD
5	3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15,430,797	18,430,797	
5	3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3,725,000	10,725,000	DDS
5	3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6,905,797	3,905,797	DLL
5	3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	1,460,000	1,460,000	ADD
5	3.4.96	Operasional PKK	3,340,000	2,340,000	ADD
5	4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	291,977,636	287,080,040	
5	4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	27,328,500	29,828,500	
5	4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	23,788,500	23,788,500	DDS
5	4.1.91	Pembinaan kelompok perikanan darat	3,540,000	3,540,000	DDS
5	4.1.94	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif		2,500,000	DDS

5 4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	153,018,000	153,018,000	
5 4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	146,650,000	146,650,000	DDS
5 4.2.91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3,268,000	3,268,000	DDS
5 4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3,100,000	3,100,000	DDS
5 4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		4,000,000	
5 4.4.96	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja		4,000,000	DDS
5 4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3,600,000	3,600,000	
5 4.5.90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	3,600,000	3,600,000	DDS
5 4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2,000,000	2,000,000	
5 4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2,000,000	2,000,000	DDS
5 4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	106,031,136	98,633,540	
5 4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	104,031,136	93,633,540	DDS
5 4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		5,000,000	DDS
5 4.7.92	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	2,000,000		DDS
5 5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	108,600,000	88,790,9600	
5 5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15,000,000	15,000,000	
5 5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	15,000,000	34,790,960	DDS
5 5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	93,600,000	54,000,000	
5 5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	93,600,000	54,000,000	DDS
	JUMLAH BELANJA	2,282,600,227	2,089,330,161	

3. Kebijakan Pembiayaan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2023)	Proyeksi (n-1/2024)	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	227,386,427	127,960,331	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	227,386,427	127,960,331	
6 1 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	227,386,427	127,960,331	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan			
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	
6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	
6 1 9 90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000	-	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan			
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	50,000,000	-	
6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa	50,000,000	-	
6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	
6 2 9 90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya			

BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RPKKALURAHAN TAHUN 2023

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kalurahan dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya masih banyak program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh kalurahan;
2. Swadaya masyarakat yang masih sangat rendah;
3. Pengalihan penggunaan dana kepada bidang lain yang masih dalam ruanglingkup pelaksanaan RPJMKalurahan yang lebih mendesak yaitu untuk kegiatan pemulihan dampak sosial dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan hewani-nabati dan kegiatan penanganan stunting.

Capaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.1.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKalurahan

1. Pendapatan Asli Desa/Kalurahan yang sangat terbatas
2. Bantuan dana dari pemerintah yang masih sedikit.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas kalurahan belum semuanya bisa terdandai karena perubahan kebijakan pemerintah dengan focus kegiatan pemulihan dampak sosial dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan hewani-nabati dan kegiatan penanganan stunting.
2. Partisipasi/Swadaya masyarakat berupa bahan/material masih sangat terbatas.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2024

Prioritas program kegiatan skala kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan melalui dana APBKalurahan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. Program Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
3. Program Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Program Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Prioritas program kegiatan skala Kalurahan Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.1.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2025, dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2026 disajikan dalam tabel 4.2.

BAB V PENUTUP

RKPKalurahan merupakan pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam peyusunan APBKalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMKalurahan.

Penyusunan RKPKalurahan melibatkan keterwakilan dari semua unsur/elemen masyarakat Kalurahan diantaranya : Pemerintah Kalurahan, BPK, LKD, KPMK, Tokoh masyarakat, pemuka pendidikan, Forum Anak, TKPK Kalurahan, BUMKal, pengelola Pariwisata, kelompok perempuan, kelompok rentan (difabel, miskin, lansia) dll, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari musyawarah kalurahan dan musyawarah rencana pembangunan kalurahan sampai kepada di peroleh rancangan Akhir RKPKalurahan.

Dokumen RKPKalurahan diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yag akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro.

Ngoro-oro, 25 Oktober 2023
Lurah,

ttd

SUKASTO

TABEL 3.1.
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

No	Uraian	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2023	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2023	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)							Sasaran SDGs Desa	Ket.	
								PAKal	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi			Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			61%	52.71%	79%	0	14,806,770	53,974,000	763,929,835	0	467,000	71,840,500	14,040,000	28,970,029		
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			81%	56.42%	89%	0	0	25,250,000	755,479,835	0	0	45,260,500	0	24,450,000		
	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan	99%	60.89%	99%	0	0	0	41,160,000	0	0	3,300,000	0	0		
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan	99%	61.06%	99%	0	0	0	555,840,000	0	0	20,400,000	0	24,450,000		
	3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya jaminan sosial Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan	98%	56.71%	98%	0	0	0	41,354,400	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera	
	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lancarnya beban Oprasional Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	83%	38.02%	83%	0	0	0	56,125,435	0	0	0	0	0	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	
	5 Penyediaan Tunjangan BPD	Terbayarnya Tunjangan Bamuskal	Kalurahan	100%	61.54%	100%	0	0	0	53,950,000	0	0	0	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	
	6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Lancarnya beban Oprasional Bamuskal	Kalurahan	70%	3.83%	70%	0	0	0	7,050,000	0	0	0	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	
	7 Penyediaan Insentif /Operasional RT/ RW	Terbayarnya insentif RT/RW	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	21,560,500	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa	

	8	Pengadaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tersedianya operasional muskal, musrenbang, kegiatan seremonial dan penanganan masalah kerawanan sosial	Kalurahan		30.50%	60%	0	0	25,250,000	0	0	0	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			59%	22.96%	76%	0	1,530,000	0	4,200,000	0	0	8,600,000	0	0	
	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Tersedianya aset perkantoran	Kalurahan	51%	100%	100%	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Gedung kantor yang lebih nyaman	Kalurahan	49%	0%	49%	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
	3	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**)	Terbangun nya penanda keistimewaan	Kalurahan	100%												11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
	4	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	Kalurahan	23%												9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
	5	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeler	Kalurahan	100%	0%	100%	0	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
	6	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang siap pakai	Kalurahan	32%	0%	52%	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
	7	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Peralatan kerja yang siap pakai	Kalurahan	55%	46.94%	80%	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			34%	18.89%	57%	0	3,500,000	8,330,000	0	0	0	475,000	10,440,000	0	
	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Dokumen profil kependudukan dan potensi Desa	Kalurahan	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	10,440,000	0	1 Desa tanpa Kemiskinan
	2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Tertatanya dokumen /arsip dengan baik	Kalurahan	55%	16.44%	55%	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya

																	desa adaptif
	3	Penyusunan monografi desa	Dokumen monografi Desa	Kalurahan	82%	45.05%	82%	0	0	0	0	0	475,000	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adap
	4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Basis data terpadu	Kalurahan	0%	42.11%	90%	0	0	8,330,000	0	0	0	0	0	0	1 Desa tanpa kemiskinan
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				69%	24.12%	96%	0	9,776,770	20,394,000	4,250,000	0	467,000	17,505,000	3,600,000	0	
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	Dokumen perencanaan desa yang partisipasif	Kalurahan	75%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Desa tanpa kesenjangan
	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Data RTM penerima BLT-DD yang akurat	Kalurahan	80%												10 Desa tanpa kesenjangan
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dokumen RPKKal	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	2,975,000	0	0	0	0	0	10 Desa tanpa kesenjangan
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Dokumen keuangan yang akuntabel	Kalurahan	100%	32.03%	100%	0	0	0	0	0	8,100,000	0	0	0	10 Desa tanpa kesenjangan
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terbayarnya honor petugas aset	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	10 Desa tanpa kesenjangan
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan /Keuangan)	Dokumen perkal Aset Desa dan Pemanfaatan tanah	Kalurahan	0%	0%	100%	0	3,885,000	0	0	0	0	0	0	0	10 Desa tanpa kesenjangan
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Dokumen LPPD, LKPD, IPPD	Kalurahan	100%	98.04%	100%	0	0	0	1,275,000	0	0	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Akses informasi Desa lebih baik	Kalurahan	24%	7.16%	80%	0	0	20,394,000	0	0	0	0	0	0	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
	9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Laporan keuangan yang akuntabel	Kalurahan	100%	26.73%	100%	0	5,891,770	0	0	0	467,000	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
	10	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	Terbelinya sragam kheki	Kalurahan		75.88%	100%	0	0	0	0	0	7,455,000	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

	11	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya monev pembangunan	Kalurahan	78%	84.62%	85%	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	10 Desa tanpa kesenjangan
5		Sub Bidang Pertanahan			0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,029	
	1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Tersedianya pengganti tanah Desa	Kalurahan	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,029	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
II		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Kalurahan	74%	21.49%	89%	0	0	533,055,960	0	25,000,000	310,850,300	0	0	0	
1		Sub Bidang Pendidikan			66%	56.49%	89%	0	0	33,325,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Penyelenggaraan PAUD /TK /TPA /TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terbayarnya honor guru dan oprasional Paud dan TK	Kalurahan	100%	49.67%	100%	0	0	24,200,000	0	0	0	0	0	0	4 Pendidikan desa berkualitas
	2	Dukungan Penyelenggaraan Paud (APE,Sarana Paud dst)	Pelatihan guru dan tersedianya sarana Paud	PAUD ABA dan Melati	98%	100.00%	98%	0	0	5,385,000	0	0	0	0	0	0	4 Pendidikan desa berkualitas
	3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Terbayarnya honor pengelola	Kalurahan	0%	37.99%	70%	0	0	3,740,000	0	0	0	0	0	0	4 Pendidikan desa berkualitas
2		Sub Bidang Kesehatan			93%	40.96%	93%	0	0	166,815,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Honor kader dan PMT	Kalurahan	100%	40.63%	100%	0	0	88,460,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Penyuluhan kesehatan untuk kader kesehatan dan masyarakat	Kalurahan	100%	0%	100%	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Pencegahan stanting	Kalurahan	75%	43.08%	75%	0	0	11,380,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD **	Tersedianya prasarana posyandu	Kalurahan	90%	0%	90%	0	0	7,640,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
	5	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Terseleenggaranya operasional/honor kader posbindu	Kalurahan	99%	49.85%	99%	0	0	28,290,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
	6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germa)	Terciptanya adat kebiasaan baru menghadapi covid 19	Kalurahan	84%	58.56%	84%	0	0	5,015,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
	7	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita /Siswa Paud	Siswa PAUD yang lebih sehat	Kalurahan	97%	30.92%	97%	0	0	4,705,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera

	8	Insentif Kader Kesehatan / KB	Terbayarnya insentif kader kesehatan	Kalurahan	99%	49.64%	99%	0	0	17,575,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				75%	15.79%	99%	0	0	199,522,000	0	25,000,000	310,850,300	0	0	0	
	1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/ Batas Desa	Gapura batas desa yang indah	Jatikuning		0%	100%	0	0	1,576,000	0	0	0	0	0	0	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ***).	Terbangunnya cor blok jalan	Soka		99.05%	99%	0	0	95,691,000	0	0	0	0	0	0	9 Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.	Terbangunnya cor rabat jalan	Gembyong, Klegung, Gunung asem, Senggotan, Soka		0%	99%	0	0	0	0	0	185,850,000	0	0	0	11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Sepat		0%	99%	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, slokan dll).	Terbangunnya Talud dan drainase jalan	Soka, Tawang, Jatikuning		100%	0%	100%	0	0	102,255,000	0	0	30,000,300	0	0	6 Desa layak air bersih dan sanitasi
	6	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**).	Terlaksana nya rehabilitasi balai padukuhan	Sepat, Jatikuning, Klegung		99%	0%	99%	0	0	0	25,000,000	15,000,000	0	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa
	7	Pembuatan Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Tersedianya peta wilayah dan peta sosial	Kalurahan		0%											11 Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
	8	Penyediaan Sarana prasarana milik desa	Tersedianya sarana/ prasarana pemakaman	Salaran		100%											18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				99%	0%	92%	0	0	94,022,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa***)	Rehabilitasi sumber air bersih	Sepat		0%	80%	0	0	14,473,000	0	0	0	0	0	0	6 Desa layak air bersih dan sanitasi
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistim Pembuangan Air Limbah Rumah tangga**)	Pembangunan SPAL Rumah Tangga	Kalurahan		0%	98%	0	0	18,830,000	0	0	0	0	0	0	6 Desa layak air bersih dan sanitasi

	3	Pemberian stimulan jamban sehat	Jamban sehat bagi RTM	Kalurahan	97%	0%	97%	0	0	60,719,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera
	4	Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	Terkelolanya sampah	Kalurahan	100%												7 Desa berenergi bersih dan terbarukan
5		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			26%	31.35%	76%	0	0	23,071,960	0	0	0	0	0	0	
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Baliho/poster informasi Desa	Kalurahan	52%	5.11%	52%	0	0	9,400,000	0	0	0	0	0	0	10 Desa tanpa kesenjangan
	2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Tersedianya alat/mesin cadangan TIK	Kalurahan	0%	63.64%	100%	0	0	13,671,960	0	0	0	0	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa
6		Sub Bidang Pariwisata			85%	72.85%	88%	0	0	16,300,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pengembangan Pariwisata tingkat desa	Pariwisata di kalurahan yang maju	Kalurahan		57.14%	90%	0	0	9,450,000	0	0	0	0	0	0	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata
	2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Desa wisata yang maju	Kalurahan	85%	94.53%	85%	0	0	6,850,000	0	0	0	0	0	0	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata
III		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			70%	19.09%	74%	0	4,975,000	3,725,000	6,500,000	0	0	16,457,800	9,422,600	24,005,797	
1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			75%	61.39%	79%	0	0	0	0	0	0	10,707,800	3,033,600	4,320,000	
	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	Satuan linmas yang lebih baik	Kalurahan	35%	0%	50%	0	0	0	0	0	0	10,088,400	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
	2	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap bencana skala lokal desa	Lembaga yang siaga menghadapi bencana	Kalurahan	96%												13 Desa tanggap perubahan iklim
	3	Pelatihan/Penyuluhan Sosialisasi Kepada masy di Bid.Hukum dan perlindungan Masy.	Pamong, Lembaga dan masyarakat yang patuh hukum	Kalurahan	100%												18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
	4	Pembinncaanaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Lembaga Kaltana yang terlatih	Kalurahan	68%	89.35%	89.35%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	13 Desa tanggap perubahan iklim
	5	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Tersedianya peralatan menghadapi	Kalurahan		98.80%	98.80%	0	0	0	0	0	0	619,400	3,033,600	0	13 Desa tanggap perubahan

		bencana														iklim	
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			93%	8.96%	63%	0	4,975,000	0	0	0	0	0	0	12,780,000		
	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Terbinanya group kesenian	Kalurahan	0%	0%	40%	0	4,975,000	0	0	0	0	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil desa tkt kec/kab**)	Terkirimnya kontingen kesenian dalam perlombaan	Kalurahan		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif		
	3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Terlaksana nya peringatan HUT dan hari jadi Kab GK	Kalurahan	85%	17.92%	85%	0	0	0	0	0	0	0	9,430,000	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif		
	4 Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Terbinannya ustad.Rois dan terlaksana safari Ramadhan	Kalurahan	100%											4 Pendidikan desa berkualitas		
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			41%	5.10%	83%	0	0	0	1,700,000	0	0	5,750,000	6,389,000	0		
	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt. kec/kab.**)	Terkirimnya kontingen olah raga tkt kapanewon & kabupaten	Kalurahan	0%	0%	80%	0	0	0	0	0	0	4,050,000	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera		
	2 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Terselenggaranya turnamen olahraga tkt kalurahan	Kalurahan	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	5,750,000	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera		
	3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Sarana olah raga yang baik	Kalurahan	53%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	2,339,000	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera		
	4 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Terbinanya karang taruna	Kalurahan	0%											18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif		
	5 Operasional Karang Taruna	Lancarnya beban oprasional karang taruna	Kalurahan	69%	15.29%	69%	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif		
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			71%	11.45%	72%	0	0	3,725,000	4,800,000	0	0	0	0	6,905,797		
	1 Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Terbayarnya honor KPM	Kalurahan	96%	40.32%	96%	0	0	3,725,000	0	0	0	0	0	0	3 Desa Sehat dan Sejahtera	

	2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kemiskinan di Desa teratasi	Kalurahan	93%	0%	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,905,797	1 Desa tanpa Kemiskinan
	3	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Lancarnya beban oprasional LPMD	Kalurahan	0%	5.48%	5%	0	0	0	1,460,000	0	0	0	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa
	4	Operasional PKK	Lancarnya beban oprasional PKK	Kalurahan	93%	0%	93%	0	0	0	3,340,000	0	0	0	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				55%	36.47%	75%	0	0	291,977,636	0	0	0	0	0	0	
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				93%	0%	97%	0	0	27,328,500	0	0	0	0	0	0	
	1	Bantuan Perikanan (Bibit,Pakan dll)	Terbangunnya kolam ikan air tawar	Kalurahan	93%	0%	93%	0	0	23,788,500	0	0	0	0	0	0	12 Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
	2	Pembinaan kelompok perikanan darat	terbinanya kelompok perikanan	Kalurahan	0%	0%	100%	0	0	3,540,000	0	0	0	0	0	0	4 Pendidikan desa berkualitas
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				84%	2.07%	84%	0	0	153,018,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Terlaksananya pemberian bibit tanaman bagi masyarakat	Kalurahan	73%	0%	73%	0	0	146,650,000	0	0	0	0	0	0	2 Desa tanpa Kelaparan
	2	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/ peternakan	Pengolahan hasil pertanian	Kalurahan	85%	96.94%	85%	0	0	3,268,000	0	0	0	0	0	0	2 Desa tanpa Kelaparan
	3	Pembinaan klompok tani/ Gapoktan	Klompok tani yang lebih maju	Kalurahan	93%	0%	93%	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	17 Kemitraan untuk pembangunan desa
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				100%												
	1	Pelatihan dan penguatan penyandang Difable (penyandang Disabilitas)	Penyandang disabilitas yang mandiri	SLB SP	100%												10 Desa tanpa kesenjangan
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)				0%	0%	30%	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	
	1	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan /Daerah/Nasional	Terkirimnya klompok promosi/pameran ukm di tkt kapanewon &	Kapanewon dan kabupaten	0%	0%	30%	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	8 Pertumbuhan ekonomi desa merata

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

KALURAHAN : NGORO-ORO
 KAPANEWON : PATUK
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					833,640,335					
1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan	13 OB	Lurah	12 bulan	44,460,000	ADD, PBH	√			Januari - Desember
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan	260 OB	Pamong dan Staf Pamong Kalurahan	12 bulan	600,690,000	ADD, DLL, PBH	√			Januari - Desember
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan	300 OP	Lurah, Pamong dan Staf Pamong	12 bulan	41,354,400	ADD	√			Januari - Desember
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	40,325,435	ADD	√			Januari - Desember
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan	117 OB	Anggota BPK	12 bulan	53,950,000	ADD	√			Januari - Desember
6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan	1 Ls	Anggota BPK	12 bulan	6,050,000	ADD	√			Januari - Desember
7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan	612 OB	Ketua RT/RW	12 bulan	21,560,500	PBH	√			Januari - Desember

8	Pengadaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan	3 paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	25,250,000	DDS	√			Januari - Desember
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa					22,800,000					
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	1,100,000	ADD	√			Juni
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	5,000,000	PBH	√			Juli
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	3,000,000	DLL	√			Juli
4	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	7,000,000	PBH	√			Januari - Desember
5	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	1,500,000	PAD	√			Januari - Desember
6	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,100,000	ADD	√			Januari - Desember
7	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	3,100,000	ADD	√			Januari - Desember
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					15,245,000					
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	4,440,000	PBH	√			Juli, Desember
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,000,000	PAD	√			Pebruari
3	Penyusunan monografi desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	475,000	PBH	√			Juli, Desember
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	8,330,000	DDS	√			Januari/ Pebruari
4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					87,530,040					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Bamuskal	3 bulan	2,975,000	ADD	√			Juli, September, Desember
2	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Bamuskal	2 bulan	4,650,000	PBH	√			Pebruari, November
3	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan	24 OB	Petuga Aset	2 bulan	4,190,000	PBH	√			Oktober, November
4	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Bamuskal	3 bulan	3,885,000	PAD	√			Januari, Agustus, Desember
5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan	1 Ls	Pemkal	2 bulan	1,275,000	ADD	√			Januari - Desember
6	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	3 bulan	24,925,000	DDS	√			Juni, Agustus, Oktober

	7	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	3 bulan	2,000,000	PBH	√			Januari - Maret
	8	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan	1 Ls	Pemkal	12 bulan	6,358,770	PAD, PBK	√			Januari - Desember
	9	Pengisian perangkat desa/Staf Perangkat Desa	Kalurahan	2 orang	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	15,700,000	ADD	√			Januari - Desember
	10	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Kalurahan	2 orang	Pamong Kalurahan	1 bulan	20,500,000	PBH	√			April
	11	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan	2 kali	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	1,071,270	PAD	√			Juli, November
	5	Sub Bidang Pertanahan					4,520,029					
	1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Kalurahan	1 paket	Pamong Kalurahan	12 bulan	4,520,029	DLL			√	Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 1							963,735,404					
2	II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
	1	Sub Bidang Pendidikan					33,325,000					
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan	96 OB	Guru PAUD/TK	12 bulan	24,200,000	DDS	√			Januari - Desember
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kalurahan	1 Ls	Guru PAUD/TK	1 bulan	5,385,000	DDS	√			Mei
	3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kalurahan	24 OB	Petugas Perpustakaan	12 bulan	3,740,000	DDS	√			Januari - Desember
	2	Sub Bidang Kesehatan					170,815,000					
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Kalurahan	1104 OB	Kader, Bumil dan Balita	12 bulan	88,460,000	DDS	√			Januari - Desember
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kalurahan	1 Ls	KPM dan Masyarakat	12 bulan	3,750,000	DDS	√			Januari - Desember
	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	11,380,000	DDS	√			Januari - Desember
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	3 bulan	7,640,000	DDS	√			Maret, Mei, September
	5	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan	562 OB	Kader Posbindu	12 bulan	28,290,000	DDS	√			Januari - Desember
	6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	6,515,000	DDS	√			Januari - Desember
	7	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan	175 Anak	Anak Balita/PAUD	3 bulan	4,705,000	DDS	√			April, Agustus, Desember

8	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kalurahan	1 kali	Pengurus Kampung KB	3 bulan	2,500,000	DDS	√		April, Agustus, Desember
9	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan	492 OB	Kader kesehatan	12 bulan	17,575,000	DDS	√		Januari - Desember
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					292,426,000				
1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Jatikuning	1 Unit	Masyarakat	2 bulan	1,576,000	DDS	√		Juli - Agustus
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Perkerasan Jalan Desa	Senggotan	p 175 m / 52.50 m ³	Masyarakat	3 bulan	70,000,000	DDS	√		Juni - Juli
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Perkerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	5 Padukuhan	p 400 m / 133 m ³	Masyarakat	3 bulan	145,850,000	PBK	√		Juli - September
4	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Senggotan	p 16 m / 31.20 m ³	Masyarakat	2 bulan	50,000,000	DDS	√		Agustus - September
5	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Salaran	1 Unit	Masyarakat	2 bulan	25,000,000	PBP	√		Oktober - Nopember
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman					181,607,000				
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kalurahan	1 Ls	Klompok Masyarakat	2 bulan	16,680,000	DDS	√		Juni - Juli
2	Pembangunan/Rehabilitas Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)	Kalurahan	2 Unit	Masyarakat	3 bulan	17,500,000	DDS	√		Agustus - Oktober
3	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Jatikuning	1 Ls	Bank Sampah	3 bulan	65,185,000	DDS	√		Agustus - Oktober
4	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kalurahan	36 RTM	RTM/Masyarakat	3 bulan	37,660,000	DDS	√		Agustus - Oktober
5	Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan	8 RTM	RTM/Masyarakat	3 bulan	44,582,000	DDS	√		Juli - September
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					14,540,960				
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	9,400,000	DDS	√		Januari - Desember
2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	5,140,960	DDS	√		Januari - Desember
6	Sub Bidang Pariwisata					17,000,000				
1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, Pokdarwis dan Pengelola wisata	3 bulan	12,000,000	DDS	√		Mei -Juli
2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, Pokdarwis dan Pengelola wisata	3 bulan	5,000,000	DDS	√		September - November

Jumlah Per Bidang 2						709,713,960					
3	III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				8,515,000					
1		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan	1 Ls	Linmas kalurahan	4 bulan	4,195,000	PBH	√		Maret, Juni, September, Desember
2		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan	1 Ls	FPRB, KSB dan Sibat	2 bulan	4,320,000	PBH	√		Juli - Agustus
2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Kalurahan				4,975,000				
1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan	24 OR	Pelatih kesenian	1 bulan	4,975,000	PAD	√		Juli
3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					8,089,000				
1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kalurahan	3 Kali	Kontingen atlit kalurahan	1 bulan	4,050,000	PBH	√		Agustus
2		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	2,339,000	PBH	√		Januari - Desember
3		Operasional Karang Taruna	Kalurahan	1 Ls	Karangtaruna	12 bulan	1,700,000	ADD	√		12 bulan
4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					18,430,797				
1		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan	24 OB	KPM	12 bulan	10,725,000	DDS	√		Januari - Desember
2		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan	1 Ls	Tim KPCKal	12 bulan	3,905,797	DLL	√		Januari - Desember
3		Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan	1 Ls	LPMP dan LPMK	12 bulan	1,460,000	ADD	√		Januari - Desember
4		Operasional PKK	Kalurahan	1 Ls	PKK	12 bulan	2,340,000	ADD	√		Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 3						40,009,797					
4	IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					29,828,500				
1		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	2 bulan	23,788,500	DDS	√		Maret - April
2		Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan	1 Ls	Klompok perikanan	1 bulan	3,540,000	DDS	√		Mei
3		Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	Kalurahan	1 Ls	Klompok perikanan	1 bulan	2,500,000	DDS	√		Mei
2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					153,018,000				
1		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	2 bulan	146,650,000	DDS	√		Maret - April

	2	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	3,268,000	DDS	√			Juni
	3	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan	1 Ls	Anggota Kelompok Tani / Gapoktan	1 bulan	3,100,000	DDS	√			September
	3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					4,000,000					
	1	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan	1 Ls	Remaja	1 kali	4,000,000	DDS	√			Agustus, Oktober
	4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					3,600,000					
	1	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kalurahan	1 Ls	Kelompok UMKM	2 bulan	3,600,000	DDS	√			Agustus, Oktober
	5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					2,000,000					
	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kalurahan	2 kali	Pengurus BUMKal	2 bulan	2,000,000	DDS	√			Mei, September
	6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					98,633,540					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Kalurahan	1 Unit	Pemka dan Masyarakat	3 bulan	93,633,540	DDS	√			September - November
	2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Kalurahan	1 Ls	Pelatihan kelompok usaha	1 bulan	5,000,000	DDS	√			November
Jumlah Per Bidang 4							291,080,040					
5	V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA										
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					34,790,960					
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	34,790,960	DDS	√			Januari - Desember
	2	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa					54,000,000					
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	54,000,000	DDS	√			Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 5							88,790,960					
JUMLAH TOTAL							2,093,330,161					

Tabel 4.2
 DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN) TAHUN 2025
 SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2026

KALURAHAN : NGORO-ORO
 KAPANEWON : PATUK
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

N O	BIDANG	URUSAN	OPD	NAMA KAMUS/ USULAN PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	HARGA PER SATUAN	DEVINISI OPERASIONAL/ SYARAT & KETENTUAN	KET.
1	Bidang Ekonomi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPKUKMTK	(PIWK) - Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kelompok Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM yang terlatih di bidang kewirausahaan dan manajemen UMKM.	kelompok	13,870,000	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan jiwa kewirausahaan dan pemahaman tentang manajemen usaha bagi UMKM di semua sektor sehingga menjadi UMKM yang mandiri, mampu bersaing dan mengembangkan usahanya. 1. mengajukan proposal. 2. jumlah peserta 20 orang by name by address diantaranya dari data BDT minimal 20%. 3. peserta dalam usia produktif. 4. pelatihan dilaksanakan selama 3 hari.	PIWK
2	Bidang Ekonomi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPKUKMTK	(PIWK) - Pelatihan Teknik Ecoprint	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint.	kelompok	16,000,000	Penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan keterampilan pembuatan ecoprint. Produk yang dihasilkan adalah kain motif ecoprint. Peserta punya basic tentang teknik ecoprint. 1. mengajukan proposal. 2. jumlah peserta 20 orang by name by address diantaranya dari data BDT minimal 20%. 3. peserta dalam usia produktif. 4. pelatihan dilaksanakan selama 3 hari.	PIWK

3	Bidang Fisik dan Prasarana	Pekerjaan Umum	DPUPRKP	(PIWK) - Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	m panjang	869,197.64	<p>SYARAT & KETENTUAN PENGUSULAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan pada 1 ruas jalan kabupaten dengan panjang minimal 50 meter - Ruas Jalan yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018 - Upload foto kondisi - Upload titik koordinat (titik awal-titik akhir) <p>DEFINISI OPERASIONAL</p> <p>Pembangunan Drainase Jalan Type B (sedang) Ukuran 0,8 x 0,6 m tebal 0,3 m satuan per m' berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 1.26 m3 - Pasangan Batu dengan Mortar 0.77 m3 	PIWK
4	Bidang Fisik dan Prasarana	Pekerjaan Umum	DPUPRKP	(PIWK) - Pembangunan Talud Tinggi 3 meter	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Volume Talud Jalan Kabupaten Dibangun	m3	6,390,871.06	<p>SYARAT & KETENTUAN PENGUSULAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan pada 1 ruas jalan kabupaten yang terdaftar dalam Lampiran SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018 - Pengusulan mencantumkan panjang talud (meter) minimal 10 meter - Upload foto kondisi - Upload titik koordinat 	PIWK
5	Bidang Ekonomi	Perdagangan	DISDAG	(PIS) - Bazar Produk IKM Lokal	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bazar Produk IKM Lokal, yang menampilkan 20 IKM Lokal	kali	15,000,000	<p>a. Jumlah IKM yang ditampilkan sebanyak 20 IKM</p> <p>b. Produk berkualitas dan diproduksi kontinyu</p> <p>c. Pelaksanaan bisa bersamaan dengan even-even tertentu misalkan rasulan/bersih desa, atau even tertentu lainnya, Peringatan Tujuh belas agustus</p>	PIS
6	Bidang Ekonomi	Pariwisata	DISPAR	(PIS) - Pembuatan Toilet Umum / MCK	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	Paket	61,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usulan/proposal 2. Melampirkan Surat Keterangan Kepastian lahan berupa foto copy Sertifikat kepemilikan/Surat Ijin/Surat Sewa tanah/Surat Hibah/Surat Kekancingan/Surat perjanjian pemanfaatan lahan 3. Melampirkan SK Penetapan Pokdarwis oleh Lurah atau SK Pengukuhan Pokdarwis oleh Dinas Pariwisata 4. Berlokasi di Kawasan Daya Tarik Wisata 5. Melampirkan data ketersediaan aksesibilitas (Jalan, air, dll) 6. Melampirkan data kunjungan wisata 2 Tahun terakhir 	PIS

7	Bidang Fisik dan Prasarana	Perhubungan	DISHUB	(PIS) - Pemasangan RPPJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Pemasangan RPPJ	Unit	13,000,000	- Pemasangan di Ruas Jalan Kabupaten (sesuai SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018)- Mencantumkan koordinat titik pemasangan- Spesifikasi pemasangan berupa tiang penyangga dari pipa galvanis, panel daun rambu dari alumunium, tulisan dapat memantulkan cahaya	PIS
8	Bidang Fisik dan Prasarana	Perumahan Rakyat & Pemukiman	DPUPRKP	(PIS) - Perbaikan RTLH (diluar Kawasan Kumuh)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Stimulan Perbaikan/Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Unit	20,000,000	1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga 2. Memiliki satu-satunya rumah tidak layak huni (aspek tidak layak huni: atap, lantai, dinding, ketahanan konstruksi) sehingga perlu upload foto kondisi 3. Memiliki atau menguasai tanah secara sah di tapak bangunan rumah yang akan mendapat bantuan; 4. Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten Gunungkidul (Rp1.900.000) 6. Masuk dalam database kabupaten (DTKS-Sikab Gumregah); 7. Bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB); 8. Bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan; 9. Besaran bantuan Rp. 20.000.000,-/unit (material 17,5 juta & upah tenaga 2,5 juta) 10. Lokasi selain Kalurahan Wonosari, Kepek, Selang, Baleharjo, dan Kalurahan Logandeng	PIS
9	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIS) - Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Kursi Roda	Unit	1,800,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh, cerebal palsy atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIS
10	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINSOSP3A	(PIS) - Bantuan Sosial Alat Bantu Walker/ Tongkat kaki tiga	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pemberiannbantuan alat walker/ tongkat kaki tiga	Unit	350,000	1. Penyandang disabilitas fisik, miskin/terlantar di luar panti yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh , kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh atau karena faktor usia 2. BNBA terdapat Pada SIKAB (PPKS)	PIS

11	Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	Kewilayahan	KAPANEWON	Bantuan PAH berupa wadah untuk menampung (5000 liter) air hujan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH)	RuTa	8,000,000	1. Warga terdampak kekeringan 2. Prioritas Rumah Tangga miskin 3. Tidak punya jaringan SPAMDes 4. Tidak punya jaringan PDAM 5. Tidak punya bak PAH kecuali rusak/bocor 6. Penerima masuk didata SIKAB dengan ketentuan Sumber Air yang digunakan : Air Hujan; Air sungai/danau/waduk; Mata air tak terlindungi dan Mata air terlindungi 7. Format sesuai dengan tabel dan dikirimkan dalam bentuk excel yang dilampirkan dalam usulan melalui aplikasi 8. Dokumen foto kondisi awal tempat calon pembuatan PAH	POKIR
12	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Padukuhan	Jumlah 8 bangunan balai padukuhan	Unit	75,000,000		Dana Keistimewaan
13	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembangunan Sumur bor	Jumlah 3 sumur bor untuk penyediaan air untuk masyarakat	Unit	200,000,000		Dana Keistimewaan
14	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembanguna Omah Jaga Warga	Jumlah 9 bangunan kegiatan kelompok jaga warga	Unit	25,000,000		Dana Keistimewaan
15	Bidang Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan				Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Peningkatan Potensi Desa Wisata	1 Angkatan	Angkatan	10,000,000		Dana Keistimewaan